



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TRANSFORMASI SDM APARATUR UNTUK Mendukung REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

bangga
melayani
bangsa



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



1.

Birokrasi yang
Berdampak,
Dirasakan Langsung
Masyarakat

2.

Reformasi Birokrasi
**Bukan Tumpukan
Kertas**

3.

Birokrasi **Lincah
dan Cepat**

5 Prioritas Kerja 2019-2024



1

Pembangunan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2

Pembangunan Infrastruktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3

Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4

Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5

Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

Menuju **Indonesia** **4** Besar Ekonomi Dunia **2050**

Diperlukan:

- ✓ Birokrasi Profesional
- ✓ Reformasi Birokrasi Berdampak
- ✓ Pelayanan Publik Ekselen



Dilema Reformasi Birokrasi

Zona Nyaman, takut perubahan

KKN Kecurangan Jual-Beli Jabatan

Politisasi ASN

Sistem anggaran yang "lemah", kesejahteraan ASN menjadi tidak diperhatikan

Masalah Non ASN yang semakin jauh dari selesai



Indikator Penting

Corruption Perception Index	Rank 102/180 (2020)	Rank 96/180 (2021)
World Competitiveness Rank	Rank 37/177 (2021)	Rank 44/63 (2022)
Trust Barometer	Rank 3/27 (2020)	Rank 3/27 (2021)
Government Effectiveness Index	Rank 72/192 (2018)	Rank 62/192 (2021)
E-Government Index	Rank 88/193 (2020)	Rank 77/193 (2022)
EoDB	Rank 72/190 (2018)	Rank 73/190 (2019)
E-Participation Index	Rank 57/193 (2020)	Rank 37/193 (2022)

Birokrasi Profesional dan Berkelas Dunia



Dunia yang VUCA dengan Triple Disruption yang dipicu

- Teknologi (Industri 4.0 menuju Era Society 5.0)
- Generasi Millennials + Bonus Demografi
- Pandemi



ASN Profesional

- Berorientasi Pelayanan
- Akuntabel
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif



TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA

BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF

AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF

Transformasi Organisasi

Delayering
Eselonisasi

Organisasi yang
Agile, Fleksibel, dan
Kolaboratif

Transformasi SDMA



Transformasi Sistem Kerja

Super Apps (Aplikasi Umum SPBE)

Digitalisasi
Pelayanan Publik

Digitalisasi
Proses Bisnis Pemerintah

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Transformasi Menyeluruh



panrb

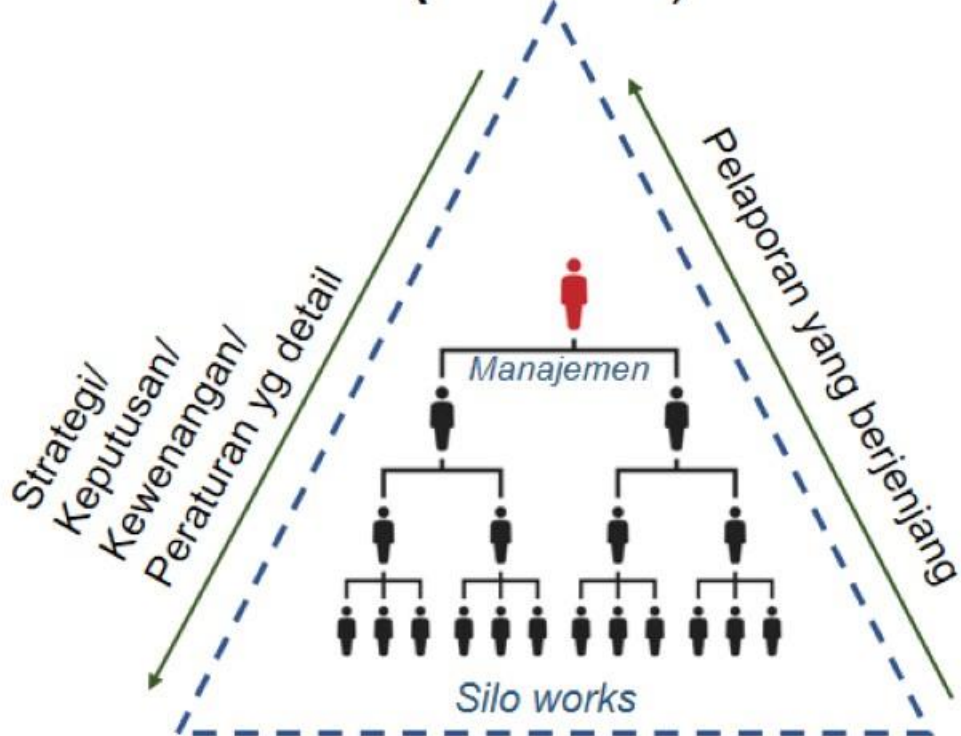
KEHENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



G20
INDONESIA
2022

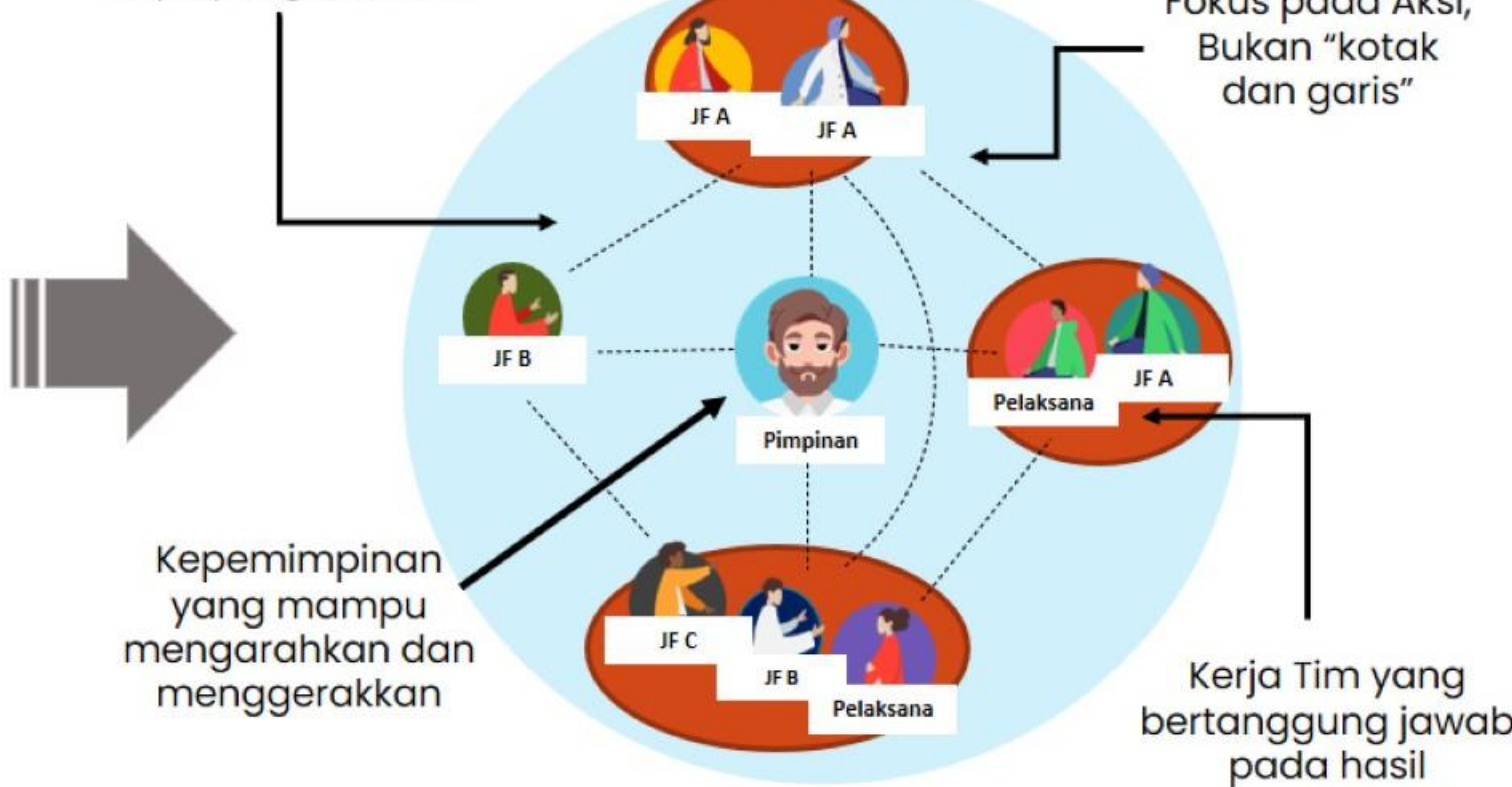
TRANSFORMASI ORGANISASI Melalui Penyederhanaan Birokrasi

Organisasi Tradisional (Hierarki)



Perubahan cepat,
dinamis, sumber
daya yang fleksibel

ORGANISASI AGILE



Dukungan Tata Kelola Digital

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

(Diolah dan diadaptasi dari McKinsey)

menpan.go.id



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

STATISTIK ASN DI INDONESIA

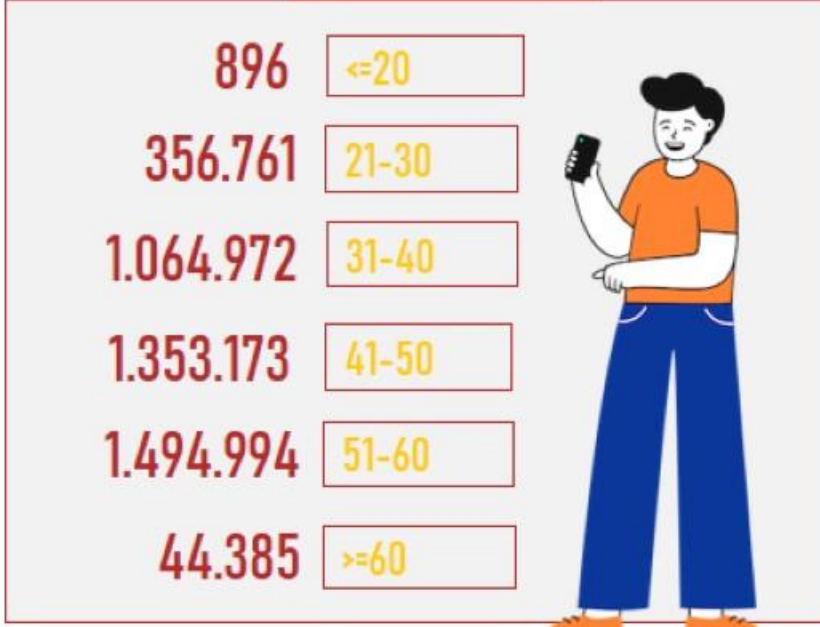
*Data BKN Per 30 September 2022

4.315.181

3.956.018 PNS
359.163 PPPK



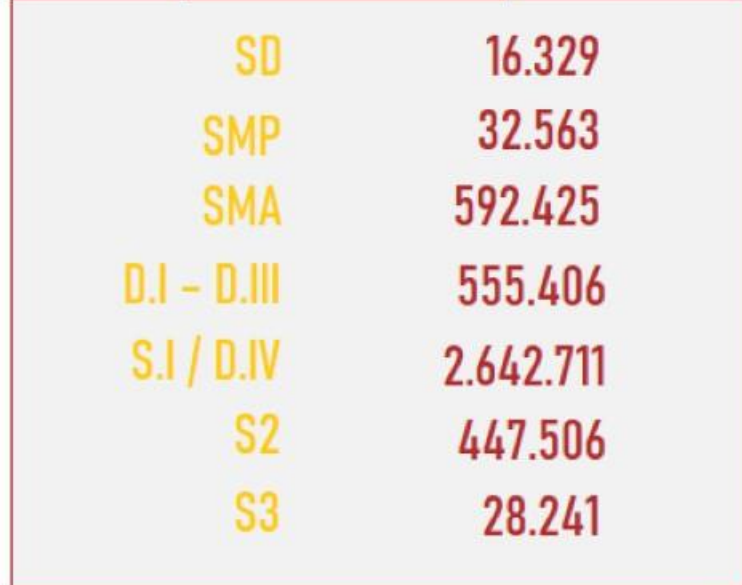
USIA



JABATAN



PENDIDIKAN



GOLONGAN



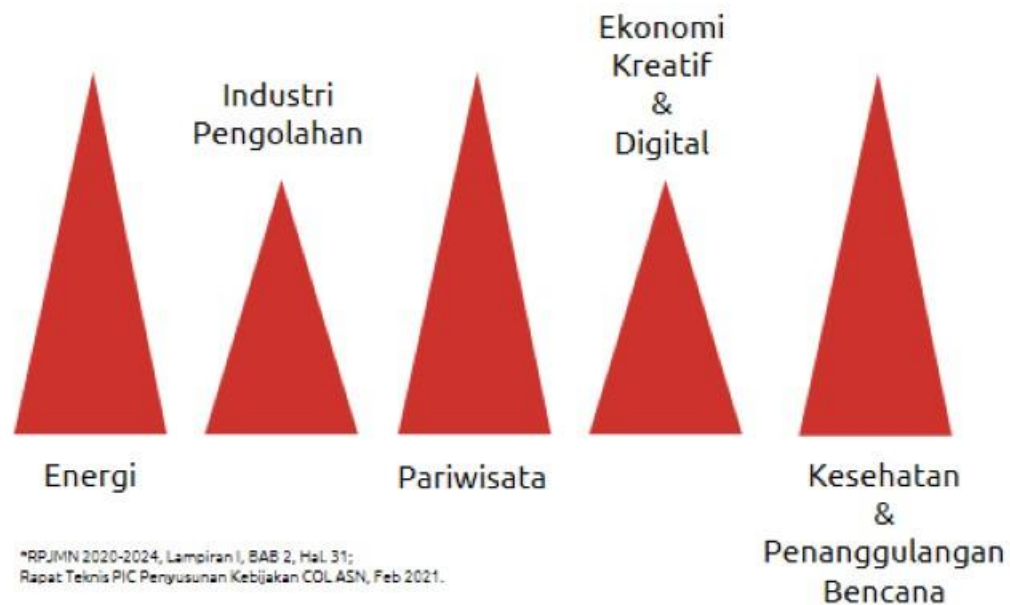
FUNGSIONAL
2.103.673
58%

PELAKSANA
1.503.683
42%

PEMENUHAN JABATAN TEKNIS SESUAI

Sektor Prioritas Nasional

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi



*RPJMN 2020-2024, Lampiran I, BAB 2, Hal. 31;
Rapat Teknis PIC Penyusunan Kebijakan COL ASN, Feb 2021.

PEMENUHAN LAYANAN DASAR

01



SEKTOR PENDIDIKAN

02



SEKTOR KESEHATAN

03



SEKTOR PENEGAKAN HUKUM

Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian

Proses Bisnis Lama (11 Tahap)

1. Input usul oleh instansi
2. Cetak dan ttd surat pengantar usul
3. Unggah berkas persyaratan aplikasi docudigital
4. Unggah surat pengantar pada aplikasi docudigital
5. Pengecekan validasi surat pengantar oleh BKN
6. Verifikasi dan validasi usulan oleh BKN
7. Paraf dan TTE Pertek oleh BKN
8. Pembuatan surat pengeluaran penyelesaian Pertek dari BKN kepada instansi melalui penghubung instansi
9. Pembuatan SK oleh instansi secara manual
10. Tembusan SK ke BKN secara fisik
11. Distribusi SK secara fisik kepada ASN oleh instansi



Proses Bisnis Baru (3 Tahap)

1. Input/Verval/Approve usul berupa data dan dokume pendukung oleh instansi *)
2. Paraf dan TTE Pertek oleh BKN
3. Pembuatan SK oleh instansi menggunakan digital signature (DS). SK tersimpan di sistem database Document Management System (DMS) BKN, Simpeg Instansi dan diterima ASN

*) Kedepan validasi dokumen persyaratan dapat dilakukan langsung oleh sistem dengan memanfaatkan teknologi OCR (Convert pdf to text)

Beberapa Proses Perubahan Layanan Kepegawaian, Tuntas Desember



1

LAMA

Penyampaian berkas usul menggunakan fisik dan harus hadir di kantor

BARU

Paperless, berkas usul dalam bentuk digital dan dapat dilakukan dimana saja (*work from anywhere*)

#paperless



2

LAMA

Pertek/SK produk BKN sebagian masih TTD cap basah, pejabat hadir di kantor dan dicetak

BARU

Pertek/SK produk BKN full TTE (digital signature), dapat dilakukan dimanapun dan tidak dicetak

#digitalsignature



3

LAMA

Penyampaian dokumen Pertek/SK BKN sebagian masih melalui penghubung dan ada surat pengeluaran

BARU

Penyampaian dokumen Pertek/ SK BKN langsung melalui sistem

#automated



4

LAMA

Informasi progres dan penyampaian dokumen SK ke ASN masih manual

BARU

Informasi progres dan hasil dokumen SK dapat dilakukan langsung oleh ASN melalui MySAPK

#transparency



5

LAMA

ASN tidak dapat melakukan perbaikan data secara langsung, perbaikan data dilakukan oleh operator entri data

BARU

ASN dapat melakukan perbaikan data secara mandiri dan dapat melihat dokumen kepegawaiannya melalui MySAPK

#collaboration



6

LAMA

Belum adanya integrasi antar sistem baik dengan instansi maupun stakeholder

BARU

Sudah ada integrasi antar sistem baik dengan instansi maupun stakeholder

#interoperability

Perubahan Pokok Tata Kelola JF

PERMENPANRB 13/2019



Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP



Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun



Penetapan target Angka Kredit (AK) di awal tahun kinerja berbasis pada Penyelarasan butir kegiatan dalam SKP



Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir kegiatan dan pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)



Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk JPT dan JA



Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya: Pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi

PERMENPANRB 1/2023



Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja



Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility



Target Angka Kredit (AK) Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun



Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja



Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF



Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi



KOMPETENSI dan KELAS JF

Instansi pembina
menyusun konten
pembelajaran,
strategi, dan program
pengembangan
kompetensi



Pemenuhan
Kompetensi
Manajerial, Sosial
Kultural, dan Teknis



Instansi Pembina berperan
sebagai **Human Capital Business
Partner**

Kelas JF ditetapkan
secara terstandar
untuk mendorong
pencapaian kualitas
JF yang sama



Pejabat Fungsional
wajib mengembangkan
kompetensi sesuai
dengan minat dan
kebutuhan dalam
sistem pembelajaran
terintegrasi

- Menyiapkan Perencanaan Pengembangan Kompetensi JF dan Penganggarannya
- Melakukan Pengembangan Kompetensi (Diklat) Secara Berkesinambungan

Selasa Hari SDM Aparatur

PIC: Benny A.
085171171925



panrb

HARI SDM APARATUR

Jadwal
Selasa, 31 Januari 2023

**BISA TANYA
KEBIJAKAN
PANRB**

- 10.00 - 11.30 WIB
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
Pokok Substansi: "Tata Cara Evaluasi Kinerja Pegawai
berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi"

zoom Meeting ID: 808 2910 4112
Pasword: 80829104112

Cp. Benny A. 085171171925

Kamis Hari Pelayanan Publik

PIC: Mulyanah
081298697555



panrb

HARI PELAYANAN PUBLIK

Jadwal
Kamis, 26 Januari 2023

**BISA TANYA
KEBIJAKAN
PANRB**

- 10.00 - 11.30 WIB
Portal Pelayanan Publik Nasional

zoom Meeting ID: 803 2130 8942
Pasword: 80321308942

Cp. Mulyanah 081298697555



panrb

HARI RB KUNWAS

Jadwal
Rabu, 25 Januari 2023

**BISA TANYA
KEBIJAKAN
PANRB**

- Sesi 1 | 10.00 - 11.30 WIB
Perjanjian Kinerja
zoom Meeting ID: 805 0348 0849
Pasword: 80503480849
- Sesi 2 | 13.30 - 15.30 WIB
Pelaporan Kinerja
zoom Meeting ID: 804 0830 4038
Pasword: 80408304038

Cp. Qonita Silmi 081291162111

Rabu Hari RB KUNWAS

PIC: Qonita Silmi
081291162111



panrb

**HARI KELEMBAGAAN
DAN TATALAKSANA**

Jadwal
Jumat, 27 Januari 2023

**BISA TANYA
KEBIJAKAN
PANRB**

- 10.00 - 11.30 WIB
Penggunaan Sistem Informasi Arsitektur SPBE

zoom Meeting ID: 810 8821 4830
Pasword: 81088214830

Cp. Herda 085216047888

Jumat Hari Kelembagaan dan Tata Laksana

PIC: Salvina Herda
085216047888

JADWAL KONSULTASI

BIDANG PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN DAN PENGADAAN



SENIN

10.00 – 11.00 WIB

JABATAN FUNGSIONAL

DAH IPMA
TAMZIL
ARINTHA

STANDAR KOMPETENSI

IQBAL
YUDHA
THEODORA

**EVALUASI/KELAS
JABATAN**

MITA
RAHMAWITA
CLAUDIA
NIKA



SELASA

08.00 – 09.00 WIB

PERENCANAAN/PENGADAAN

HESTI
TANAYA
CINDY
ARKAN
WIDITA
VIN
FATHIMAH



RABU

08.00 – 09.00 WIB

JABATAN FUNGSIONAL

DAH IPMA
TAMZIL
ARINTHA

STANDAR KOMPETENSI

IQBAL
YUDHA
THEODORA

**EVALUASI/KELAS
JABATAN**

MITA
RAHMAWITA
CLAUDIA
NIKA



KAMIS

08.00 – 09.00 WIB

PERENCANAAN/PENGADAAN

SURYO
HARIS
YOGA
EVA
DEWI
ISTI
VIN



JUMAT

08.00 – 09.00 WIB

JABATAN FUNGSIONAL

DAH IPMA
TAMZIL
ARINTHA

STANDAR KOMPETENSI

IQBAL
YUDHA
THEODORA

**EVALUASI/KELAS
JABATAN**

MITA
RAHMAWITA
CLAUDIA
NIKA



JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PUSAT

- ✓ **DIAH IPMA (KETUA POKJA)**
0851-5667-9842

INSTANSI DAERAH

- ✓ **TAMZIL**
0851-5667-9842
- ✓ **ARINTHA**
0851-5667-9842

EVALUASI/KELAS JABATAN

INSTANSI PUSAT

- ✓ **MITA (KETUA POKJA)**
0811-9117-685

INSTANSI DAERAH

- ✓ **RAHMAWITA**
0852-6838-2639
- ✓ **CLAUDIA**
0813-1115-3163
- ✓ **NIKA**
0822-3252-0404

STANDAR KOMPETENSI

INSTANSI PUSAT & DAERAH

- ✓ **IQBAL (KETUA POKJA)**
0857-1666-1555
- ✓ **YUDHA**
0812-2987-3838
- ✓ **THEODORA**
0856-4722-0161

PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI PUSAT

- ✓ **HESTI (KETUA POKJA PERENCANAAN)**
0815-1630-645
- ✓ **SURYO (KETUA POKJA PENGADAAN)**
0852-2876-7641
- ✓ **SUHADA**
0857-7516-9107



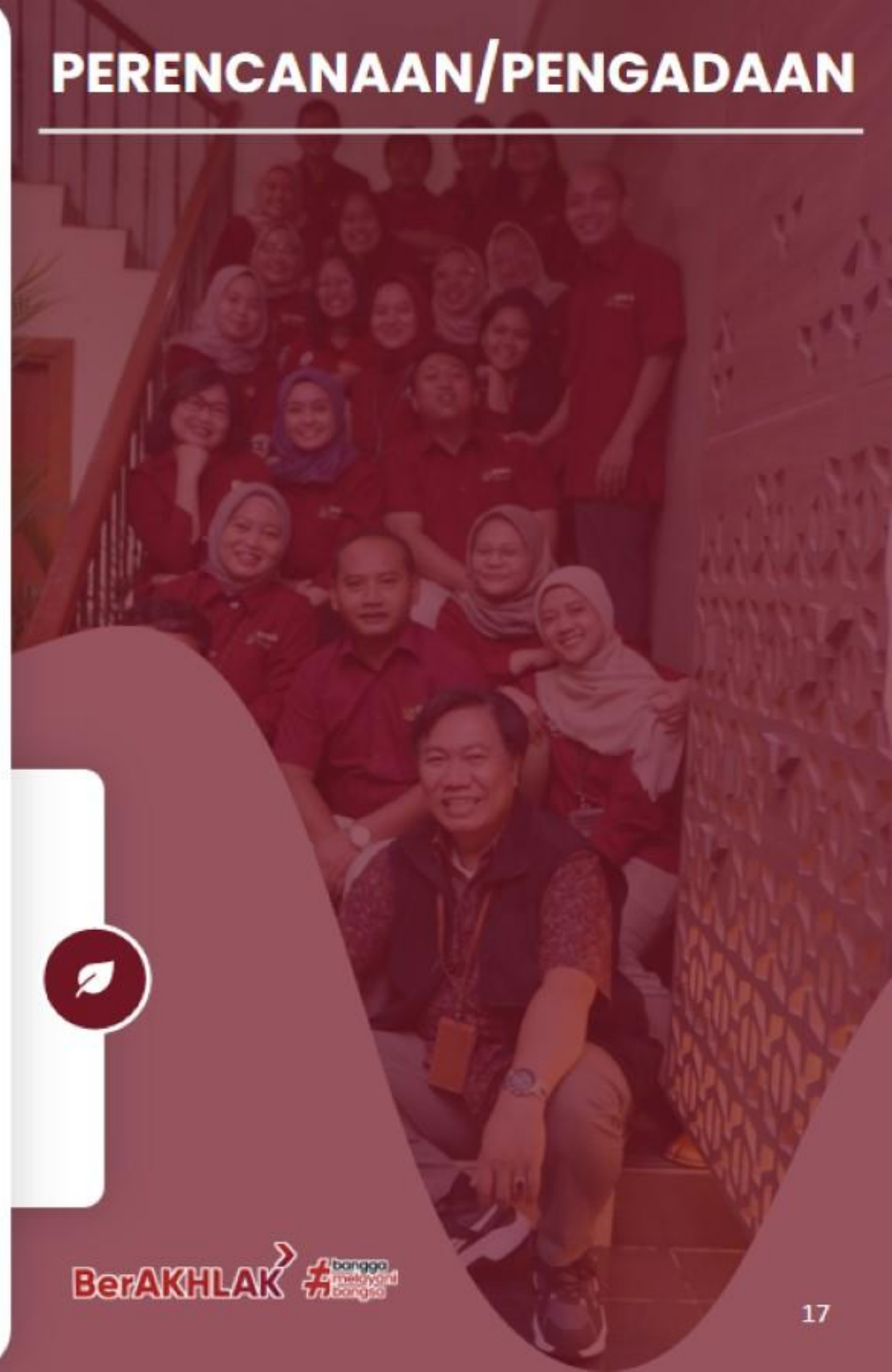
INSTANSI DAERAH

- ✓ **CINDY**
0823-8583-4842
RIAU / KEPULAUAN RIAU / SUMATERA BARAT /
JAMBI
- ✓ **FATHIMAH**
0812-2358-5879
SULAWESI SELATAN / SULAWESI TENGGARA
- ✓ **TANAYA**
0857-2780-0338
DKI JAKARTA / BALI / NTB / NTT
- ✓ **DEWI**
0881-0241-83410
SULAWESI UTARA / GORONTALO /
SULAWESI TENGAH / SULAWESI BARAT
- ✓ **ARKAN**
0812-6786-4545
ACEH / SUMATERA UTARA
- ✓ **VIN**
0813-1759-3831
BANTEN / MALUKU / MALUKU UTARA

INSTANSI DAERAH

- ✓ **KONITA**
0852-7192-5000
JAWA TIMUR
- ✓ **YOGA**
0858-5436-3068
SUMATERA SELATAN / BANGKA BELITUNG /
BENGKULU / LAMPUNG
- ✓ **EVA**
0877-2371-4982
KALIMANTAN BARAT / KALIMANTAN TENGAH /
KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN UTARA /
KALIMANTAN TIMUR
- ✓ **HARIS**
0857-1767-4876
PAPUA / PAPUA BARAT / PAPUA PEGUNUNGAN /
PAPUA SELATAN / PAPUA TENGAH
- ✓ **ISTI**
0858-5862-9912
JAWA BARAT / D.I. YOGYAKARTA
- ✓ **WIDITA**
0812-2004-4491
JAWA TENGAH

PERENCANAAN/PENGADAAN






Butuh informasi seputar ASN? **CHATBOT Si PANDay**

- ✓ Core Value & Employer Branding ASN
- ✓ Pengelolaan Kinerja
- ✓ Sistem Kerja
- ✓ Tugas Belajar & Izin Belajar
- ✓ Pengadaan ASN 2022
- ✓ Kebijakan Penanganan Tenaga Honorer

Scan QR berikut:



atau bisa chat ke:

 **0896-2707-1998**

 **t.me/SiPANDayBot**

atau akses ke: menpan.go.id



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA/
DAN REFORMASI BIROKRASI


BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**TERIMA
KASIH**

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 www.menpan.go.id

  @Kementerian PANRB

Jadwal Bisa Tanya Kebijakan PANRB Januari 2023

Hari SDM Aparatur

No.	Sesi	Tema/Isu Strategis	Jadwal
1	1	Survei BerAKHLAK	Selasa, 3 Januari 2023
	2	Manajemen PPPK	
2	1	Jabatan Fungsional di Lingkungan Instansi Pemerintah	Selasa, 10 Januari 2023
	2	Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	
3	1	Penilaian Kinerja ASN	Selasa, 17 Januari 2023
	2	Percepatan Transformasi Digital Manajemen SDM Aparatur	
4	1	Pengelolaan Kinerja ASN	Selasa, 24 Januari 2023
5	1	Penyusunan SKP Pegawai Tugas Belajar	Selasa, 31 Januari 2023
	2	ChatBot SiPANDAY	

Hari RB Kunwas

No.	Sesi	Tema/Isu Strategis	Jadwal
1	1	Agent of change	Rabu, 4 Januari 2023
	2	LHKASN	
2	1	Manajemen Internal RB	Rabu, 11 Januari 2023
	2	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	
3	1	Perjenjangan Kinerja	Rabu, 18 Januari 2023
	2	SiHARKA	
4	1	Permenpan 53 Tahun 2014(1): Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja	Rabu, 25 Januari 2023
	2	Permenpan 53 Tahun 2014(2): Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	

Live on :



Jadwal Bisa Tanya Kebijakan PANRB Januari 2023

Hari Pelayanan Publik

No.	Sesi	Tema/Isu Strategis	Jadwal
1	1	SP4N LAPOR!	Kamis, 5 Januari 2023
	2	Forum Konsultasi Publik	
2	1	Inovasi Pelayanan Publik	Kamis, 12 Januari 2023
	2	Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan	
3	1	Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional	Kamis, 19 Januari 2023
	2	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	
4	1	Portal Pelayanan Publik Nasional	Kamis, 26 Januari 2023
	2	Standarisasi Pelayanan menuju Pelayanan Publik Pasti dan Terintegrasi	

Hari Kelembagaan dan Tata Laksana

No.	Sesi	Tema/Isu Strategis	Jadwal
1	1	Evaluasi SPBE - Domain Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK	Jumat, 6 Januari 2023
	2	Evaluasi SPBE - Domain Layanan SPBE	
2	1	Clearance Belanja TIK Instansi Pusat	Jumat, 13 Januari 2023
	2	Penggunaan Sistem Informasi Arsitektur SPBE	
3	1	Peta Proses Bisnis	Jumat, 20 Januari 2023
	2	Permenpan No. 7 Tahun 2022 ttg Sistem Kerja	
4	1	Penggunaan Arsitektur SPBE	Jumat, 27 Januari 2023

Live on :



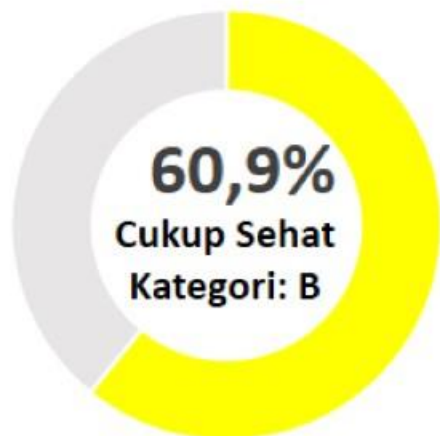


panrb

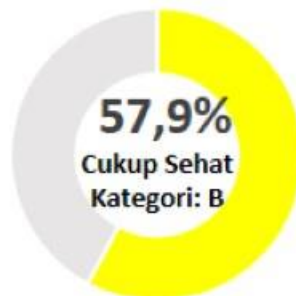
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil Indeks Implementasi BerAKHLAK Nasional

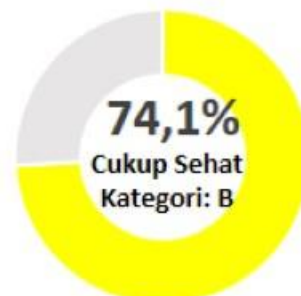
RATA RATA



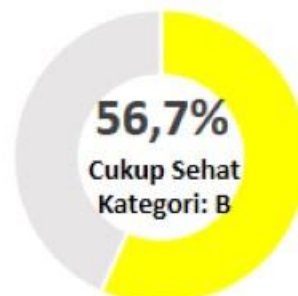
BERORIENTASI PELAYANAN



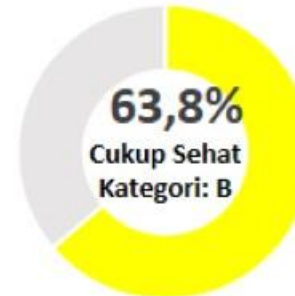
AKUNTABEL



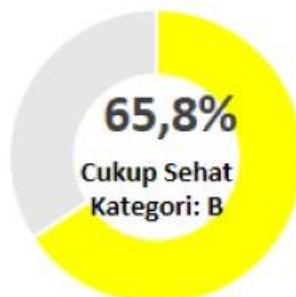
KOMPETEN



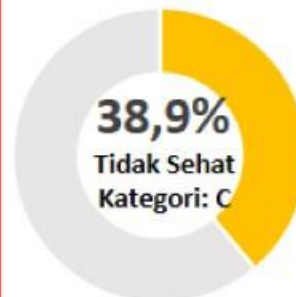
HARMONIS



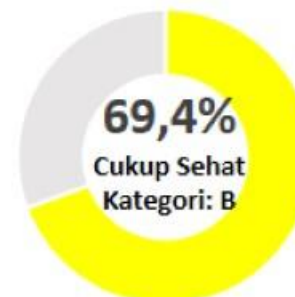
LOYAL



ADAPTIF



KOLABORATIF



KATEGORI		RANGE INDEX
A	Sehat	75% - 100%
B	Cukup Sehat	50% - 74.9%
C	Tidak Sehat	25% - 49.9%
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24.9%

DI TENGAH GONCANGAN EKONOMI DUNIA, KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU YANG TERBAIK DI ANTARA NEGARA G20



Pertumb. Ekonomi yang Kuat

Tingkat Inflasi yang Rendah

Rasio Utang yang Rendah

Indeks Saham Positif

Nilai Tukar yang Stabil

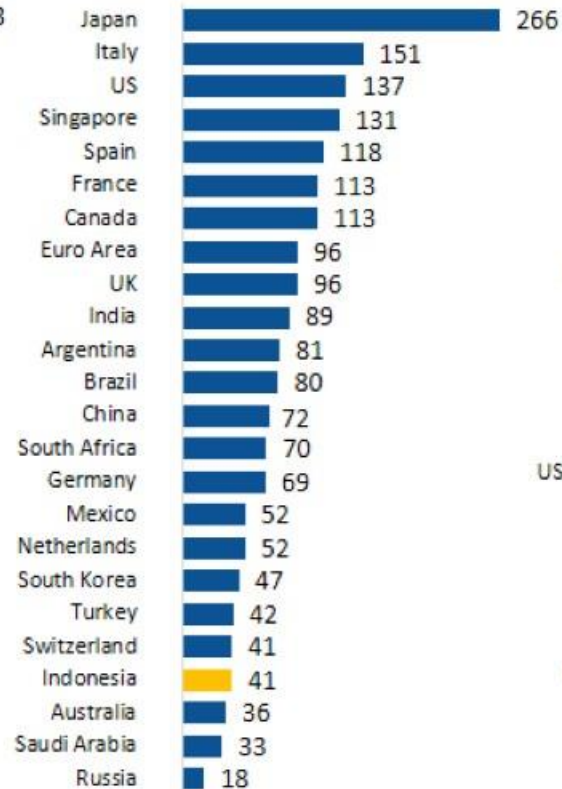
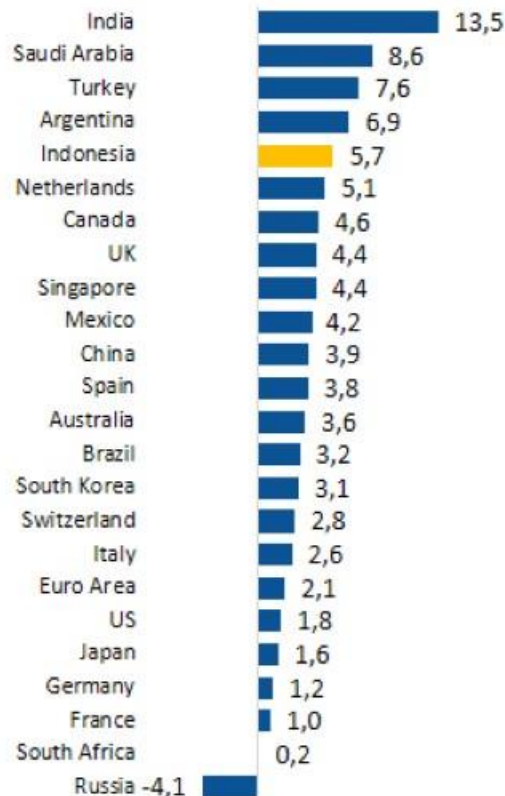
3Q Pertumb. PDB% - G20 Countries

Inflasi Inti % - G20 Countries

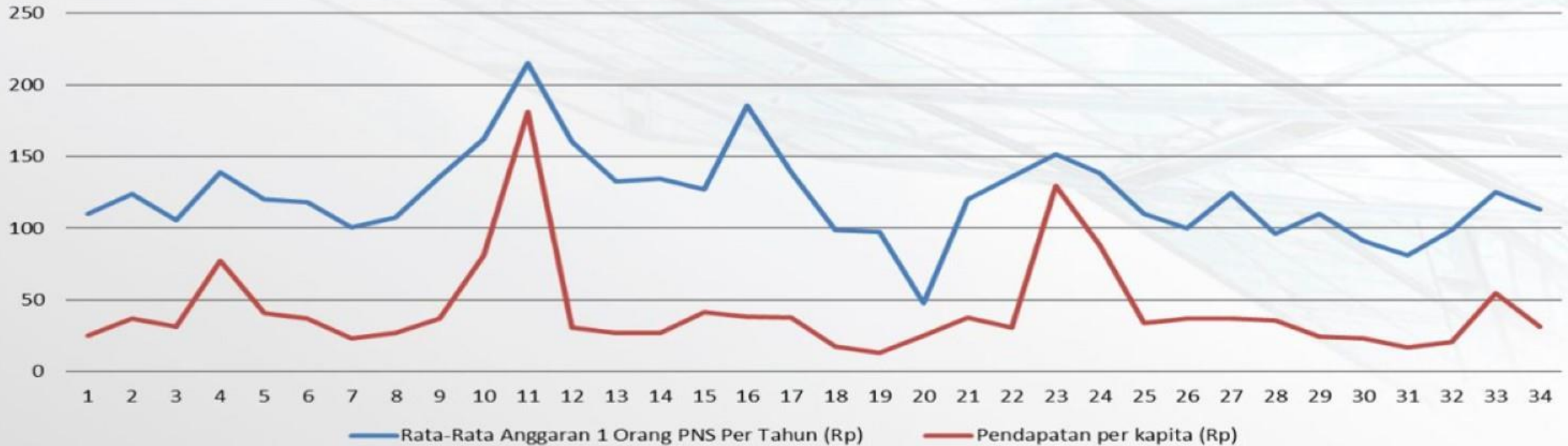
Rasio Utang thd PDB% - G20 Countries

Indeks Saham YTD% - G20 Countries

Nilai Tukar YTD% - G20 Countries



Kesejahteraan PNS vs Masyarakat



Angka rata-rata anggaran/pendapatan setiap PNS di seluruh provinsi lebih tinggi dibandingkan pendapatan perkapita.

Kesejahteraan : Pendapatan, Pendidikan dan Kesehatan

PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK MENERJEMAHKAN ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO



RB PENGENTASAN KEMISKINAN

Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan. **Peluncuran pilot project pada 3 provinsi dan 9 kab/kota pada 21 Oktober 2022.**



RB PENINGKATAN INVESTASI

Reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi. **Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda.**



RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis **struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital** pada birokrasi.



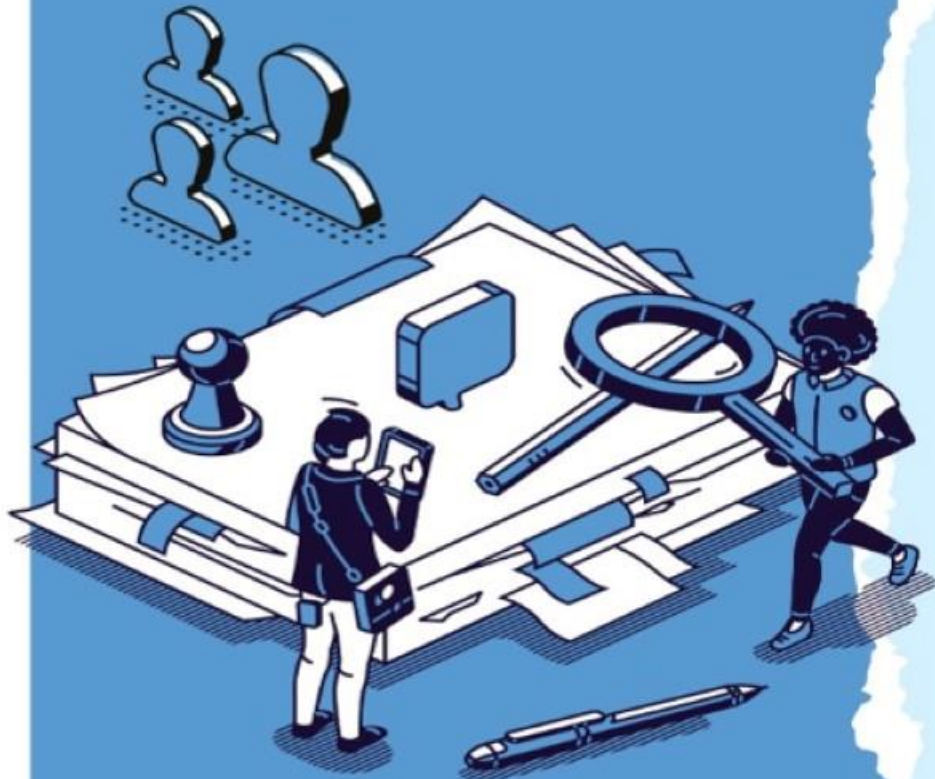
RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN

Penguatan tata kelola birokrasi merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat.

Contoh: penanganan inflasi, belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.



REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN



Target
kemiskinan

7%

(2024)



Target
kemiskinan
ekstrem

0%

(2024)



Besarnya
anggaran terkait
belum berdampak
optimal pada
besaran penurunan
kemiskinan



Perlunya keterkaitan
program terkait
pendidikan,
kesehatan, dsb.

DUKUNGAN RB TEMATIK:

RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT, dll.



Contoh *Logical Framework* Penanggulangan Kemiskinan

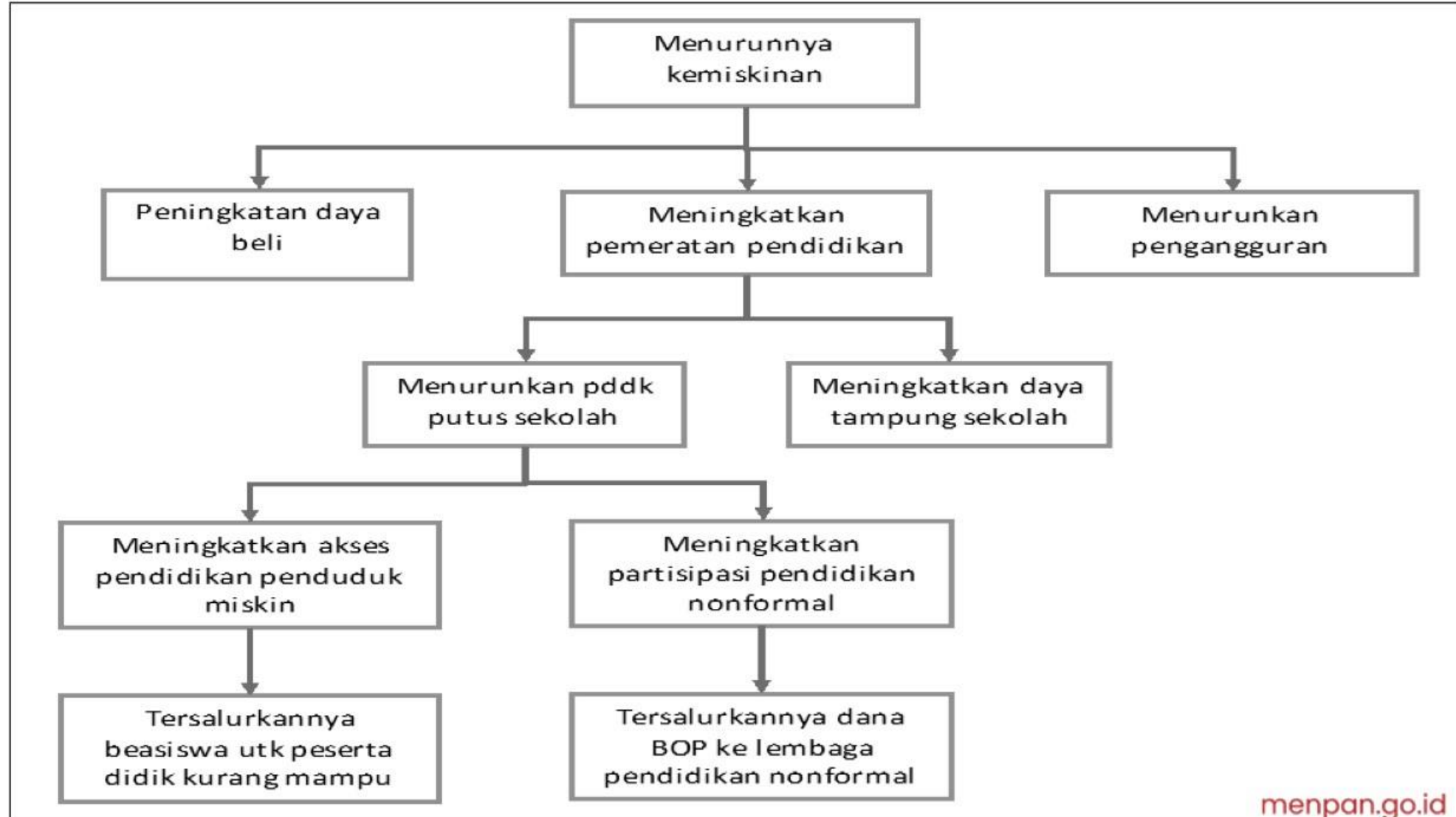
ULTIMATE
OUTCOME

INTERMEDIATE
OUTCOME

INTERMEDIATE
OUTCOME

IMMEDIATE
OUTCOME

OUTPUT



REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI



TANTANGAN:

- Resesi global berpotensi mengarah ke krisis pangan, energi, dan keuangan. **Semua negara butuh investasi.**
- Keputusan investor untuk berinvestasi tidak hanya didasarkan pada nilai keekonomian, tetapi juga **kemudahan berusaha.**
- Tata kelola birokrasi investasi masih dipenuhi banyak pertanyaan di publik, baik dari sisi **regulasi maupun implementasi.**
- Investasi dibutuhkan bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk **mewujudkan keadilan ekonomi.**

DUKUNGAN RB TEMATIK:

RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan, integrasi program, penyediaan dukungan IT, dll.

REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH



TANTANGAN

- **Perubahan Lingkungan Global** yang tidak terprediksi dan berciri VUCA menuntut **Birokrasi bekerja secara agile, adaptive, dan cepat**;
- **Tantangan untuk menjadi negara maju** (4 besar kekuatan ekonomi dunia) dan keluar dari *middle income trap* dibutuhkan **digitalisasi di seluruh sektor**
- **Kecepatan dan kemudahan pelayanan publik** menjadi tuntutan utama masyarakat



DUKUNGAN RB TEMATIK:

DIGITAL STRUKTUR

Digital Struktur birokrasi melalui penyederhanaan struktur birokrasi dan *flexible working arrangement*

DIGITAL KULTUR

Birokrasi memiliki mindset baru bahwa prioritas kerja adalah pada hasil (*outcome*) mekanisme kerja dapat dilakukan secara fleksibel dalam konteks ruang dan waktu serta jangkauan kolaborasi yang menembus sekat-sekat organisasi maupun hierarki. Digital kultur tersebut dapat berjalan dengan difasilitasi platform smart ASN yg sedang dibangun oleh PANRB.

DIGITAL KOMPETENSI

Digital kompetensi melalui peningkatan pengetahuan & *skills* yang baru agar tetap berfungsi di tengah disrupsi teknologi & iklim digital yang bercirikan VUCA.



REFORMASI BIROKRASI PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN



PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN YANG HARUS SEGERA DIRESPON

1

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

RB untuk mendorong penggunaan anggaran Pemerintah yang Efektif (tepat sasaran), Efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. **Strategi yang digunakan salah satunya dengan mendominasi E-Katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.**

2

PENGENDALIAN INFLASI

RB berfokus pada upaya dan terobosan pemerintah dalam dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. **Kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta berkerjasama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok,** menjadi salah satu keberhasilan Reformasi Birokrasi.

URGENSI PENYELENGGARAAN MPP DIGITAL

Kondisi Saat Ini

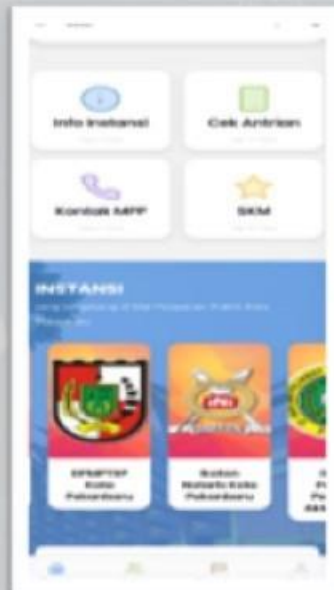
Aplikasi MPP yang dibangun oleh beberapa Pemda memiliki **proses bisnis dan fitur yang berbeda**



MPP Kab.
Banyuwangi



MPP
Kab. Sumedang



MPP Kota
Pekanbaru

Kondisi yang Diharapkan

INTEGRASI e-Services yang diselenggarakan di Pemerintah Kab/Kota melalui

Super App MPP Digital

sehingga

- ✓ Masyarakat **semakin mudah** mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- ✓ **Efisiensi & efektivitas** penyelenggaraan MPP kian meningkat.
- ✓ **Melipatgandakan investasi** untuk pembukaan lapangan kerja melalui perizinan yang kian cepat dan mudah.